

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA TNI
(TENTARA NASIONAL INDONESIA)
DALAM TUGAS PASUKAN PERDAMAIAN PBB**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

I MADE NUGRAHA WIRMAWAN

NIM : 17.C1.0101

Kepada
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2024

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu guna mengetahui secara mendalam mengenai pelindungan hukum bagi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam tugas perdamaian PBB untuk mengetahui bagaimana hukum internasional dan hukum nasional melindungi anggota TNI dalam tugas perdamaian PBB serta mengetahui tugas TNI baik itu didalam negeri ataupun luar negeri.

Metode Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif oleh penulis untuk menganalisis peraturan serta kebijakan pelindungan hukum bagi anggota TNI Dalam tugas perdamaian PBB secara hukum internasional serta hukum nasional, dan penulis juga menganalisis tugas TNI baik itu penugasan didalam negeri ataupun luar negeri.

Pertanggungjawaban hukum internasional dan hukum nasional guna memberikan pelindungan hukum bagi anggota TNI Dalam tugas perdamaian PBB sebagaimana diatur pada *Internasional Review of the Red Cross* aturan 31, aturan 33, aturan 11,12 serta 13 serta mengenai Kawasan perlindungan berdasarkan *Internasional Review of the Red Cross* aturan 35 hingga aturan 37, Piagam PBB pasal Pasal 2 ayat 2, Pasal 43 ayat 1, Konvensi Jenewa 1949, resolusi Dewan Keamanan PBB yaitu Resolusi 2272 (2016), Resolusi 2518 (2020),Resolusi 2436 (2018), Resolusi 2518 (2020), Resolusi 2627 (2022). Sedangkan pada hukum nasional diatur Pasal 7 ayat 2 sub 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tugas pokok TNI tugas perdamaian dunia sesuai kebijakan politik, Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Pasal 12 Perpres Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, Permen pertahanan Nomor 14 Tahun 2016 pasal 12 poin a sub 1 dan 2. Tugas TNI sebagai pasukan perdamaian PBB yaitu Mesir, Kong, Vietnam, Kuwait, Liberia, Mozambik, Nepal, Philipina, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tajikistan, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Haiti, Irak, Iran, Kamboja, serta penugasan TNI juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 7 ayat (2), tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelindungan hukum bagi anggota TNI Dalam tugas perdamaian PBB berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional serta tugas TNI yaitu tugas luar negeri maupun dalam negeri operasi militer selain perang.

Kata Kunci: Pelindungan Hukum Bagi Anggota TNI Dalam Tugas Perdamaian PBB, ICRC,Piagam PBB,Konvensi Jenewa 1 1949, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Perpres Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, Permen pertahanan Nomor 14 Tahun 2016

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out in depth about legal protection for members of the TNI (Indonesian National Army) in UN peacekeeping duties, to find out how international law and national law protect TNI members in UN peacekeeping duties and to find out about the duties of the TNI both domestically and abroad.

Method The research method used in this research is to use a qualitative approach by the author to analyze legal protection regulations and policies for TNI members in UN peacekeeping duties according to international law and national law, and the author also analyzes the TNI's duties both domestically and overseas country.

International legal accountability and national law to provide legal protection for TNI members in UN peacekeeping duties as regulated in International Review of the Red Cross rule 31, rule 33, rules 11, 12 and 13 as well as regarding protected areas based on International Review of the Red Cross rules 35 to rule 37, UN Charter article Article 2 paragraph 2, Article 43 paragraph 1, 1949 Geneva Convention, UN Security Council resolutions namely Resolution 2272 (2016), Resolution 2436 (2018), Resolution 2518 (2020), Resolution 2627 (2022). Meanwhile, national law regulates Article 7 paragraph 2 sub 6 of Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2004, the main tasks of the TNI are world peace tasks in accordance with political policy, Article 20 paragraph 3 of Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2004, Article 12 of Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 7 of 2008, Minister of Defense Regulation Number 14 of 2016 article 12 point a sub 1 and 2. TNI's duties as UN peacekeepers are Egypt, Kong, Vietnam, Kuwait, Liberia, Mozambique, Nepal, Philippines, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tajikistan, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Haiti, Iraq, Iran, Cambodia, as well as TNI assignments are also regulated in Law Number 34 of 2004 article 7 paragraph (2), the main duties of the Indonesian National Army.

The conclusion of this research is that legal protection for TNI members in UN peacekeeping duties is based on international law and national law as well as TNI duties, namely overseas and domestic military operations other than war.

Keywords: *Legal Protection for TNI Members in UN Peacemaking Tasks, ICRC, UN Charter, Geneva Convention 1 1949, Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2004, Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 7 of 2008, Minister of Defense Regulation Number 14 of 2016*